KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

R8W0NGZ7

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										
			H.1 H.2						Final Tidak Final	
A. IDI	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	AN YANG	DIPOTONG						
	A.1 NPWP : [4 1] [3 3 5] [7 0 6] [2] [7 4 1] [0 0 0]									
A.2 NIK : [										
A.3 Nama : ERI RANTE LA'BI										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG  MASA PAJAK (mm-yyyy)			JUMLAH PENGHASILAN BRUTO		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
		B.2	(Rp) B.3				NPWP)	B.6	B.7	
_		21-402-01			<b>B.4</b> 6.810.000		0	5	340.500	
21 702 01			6.810.000		0.810.000					
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Do			umen							
		Nama Doku	ımen	Biaya Pembayaran	Tanggal 0 8 dd 0 3 <sub>mm</sub> 2 0 2 2 <i>yyyy</i>					
B.9	9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy									
B.10	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11	PPh y	ang dipotong/dipungut y	ang diberi	kan fasilitas PPh berda	asarkan :					
					_					
C. ID	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2	Nama Instan	si Pemerintah :	RUM	AH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSA	DA MAHAK	AM PROVINSI I	KALIMANTAN	TIMUR	
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	Tanggal :		0 8	0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5	C.5 Nama Penandatangan : RIANDY			Y						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan tandatangani secara elektronik.							tan Unifikasi telah :	saya isi dengan	benar dan telah saya	
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl		enderal Pajak	c mengatur bahwa	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	